



# JRAK

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

p-ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298

Vol. 11, No. 1, Januari 2025

<https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index>

## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS DALAM KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Gerry Hamdani Putra<sup>1</sup>, Muhammad Rivandi<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

Email: [gerryhamdaniputra@akbpstie.ac.id](mailto:gerryhamdaniputra@akbpstie.ac.id)<sup>1</sup>, [muhammadrivandi@akbpstie.ac.id](mailto:muhammadrivandi@akbpstie.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to re-examine previous research between independent variables, namely regional original income and special allocation funds on financial independence. The object of this research is Financial Independence and the subject of this research is the Regional Government of West Sumatra Province 2020-2022. The population in this research is the report on the realization of the revenue budget, regional expenditure and regional income of the Regional Government of West Sumatra Province. The type of data in this research uses a quantitative approach. The data source used is secondary data, namely data collected from existing records. The sample used in this research is the realization report of the APBD (Regional Income and Expenditure Budget) of the Regency/City Government of West Sumatra Province which has been audited by BPS with a total of 19 samples. The results of this research indicate that Regional Original Income has a positive effect on regional financial independence. Meanwhile, the General Allocation Fund has a negative effect on regional financial independence.*

**Keywords:** *original regional income; regional financial independence ; special allocation funds.*

### Pendahuluan

Reformasi tersebut adalah otonomi daerah dan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Di era reformasi ini masyarakat sangat menginginkan pemerintah melakukan pengelolaan yang lebih baik. Melihat kondisi tersebut, pemerintah akhirnya mengesahkan dengan dikeluarkan

Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 untuk mengatur pemberian otonomi daerah sebagai bentuk perubahan Amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014.

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin mandiri suatu daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pusat. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat menginginkan kemandirian keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini ketergantungan daerah terhadap sumber keuangan dari Negara dan di Provinsi. Jika kemandirian ekonomi daerah benar-benar meningkat, maka ketergantungan daerah terhadap dukungan pemerintah pusat dan daerah akan berkurang. Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan otonomi daerah. Dengan mewujudkan otonomi daerah, diharapkan daerah dapat mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, diasumsikan bahwa setiap daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah (Kustianingsih et al., 2018).

Keterampilan perencanaan dan pengendalian keuangan yang lemah. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran-kebocoran yang sangat besar bagi daerah tersebut. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membiayai kebutuhan untuk

pengeluaran daerah yang sangat kecil dan bervariasi dari daerah, adalah antara 10% hingga 50%. Sebagian besar kabupaten di Provinsi ini dapat membiayai kurang dari 10% dari kebutuhan belanja mereka. Distribusi pajak antar daerah mengalami tekanan yang besar karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat kecil dan bervariasi, dimana hal ini terjadi karena perbedaannya yang sangat besar jumlah penduduk, keadaan geografis (mengakibatkan biaya yang relatif tinggi) dan kemampuan masyarakat dalam menyerap biaya pelayanan kepada masyarakat yang sangat berbeda.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Mahardika, (2022) menyebutkan bahwa lebih besar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, maka akan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Karena PAD yang dihasilkan tinggi maka daerah tersebut dapat membiayai kebutuhannya sehingga akan mengurangi dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sejalan dengan penelitian (Puspitasari & Salisa, 2017) bahwa PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah pusat bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut.

Riset gap penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Peneliti mengambil objek penelitian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat terletak dibagian

barat pulau Sumatra dan langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi Sumatera Barat banyak memiliki destinasi wisata alam, mulai dari gunung, pantai, pulau, danau, dan perkebunan. Hal ini yang menjadikan Provinsi Sumatera Barat potensial dalam meningkatkan pendapat[atan asli daerah melalui optimisasi destinasi objek yang dipungut atau diperoleh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan alat yang digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah. PAD daerah muncul dari penggunaan sumber daya daerah yang meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan investasi daerah yang dipisahkan, dan pendapatan wajib lainnya. Pendapatan Asli Daerah didasarkan UU No 33 Tahun 2004 yaitu tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yaitu adalah pendapatan yang dikumpulkan atau diperoleh daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Febrianty et al., 2023) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah melalui pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan berdasarkan peraturan daerah. Menurut penelitian Mulyani & Wibowo, 2017) rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat dilihat pada persamaan 1.

$$\begin{aligned} PAD = & \text{Pajak Daerah} + \\ & \text{Retribusi Daerah} + \\ & \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} + \\ & \text{Lain – lain PAD yang Sah} \end{aligned} \quad (1)$$

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah bantuan khusus yang diberikan kepada seluruh daerah dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kemampuan dan kebutuhan permintaan, yang disalurkan menurut suatu rumusan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum menunjukkan bahwa yang daerah miskin dan tertinggal harus menerima lebih banyak dari pada daerah yang kaya. Menurut penelitian (Amalia Fauziah N & Haryanto, 2019)

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan kota untuk membiayai yang diukur dengan menggunakan rasio

### **Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil oleh data statistic dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian kaeuangan daerah. Hipotesis pertama pada penelitian ini dapat diterima dengan kata lain memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Yang artinya bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan Upaya peningkatan dalam membangun daerah agar dapat digunakan oleh Masyarakat setempat, sehingga nantinya akan meningkatkan Kemandirian Keuangan daerah yang maksimal.

PAD adalah pendapatan yang bersumber dari setiap orang atau badan yang menggunakan jasa atau fasilitas dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah,

artinya bahwa setiap peningkatan PAD akan diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah (Malau & Simarmata, 2020).

**H1** : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

Pengaruh Dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Menurut Indrianingrum & Priyono, Nuwun, (2023) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif maupun signifikan terhadap tingkat kemandirian Kabupaten Magelang. Semakin sedikit Dana Distribusi Khusus (DAK) yang diterima suatu daerah, maka semakin kurang kemandirian daerah tersebut dari pemerintah pusat. Pemda Magelang tidak mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi kebutuhannya.

Mahardika, (2022) melakukan penelitian tentang dana alokasi khusus pada tingkat kemandirian daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus memiliki berpengaruh signifikan dan kecenderungan koefisien positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

**H2:** Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik

pengambilan sampel purposive sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017).

Data sekunder yang peneliti gunakan berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah (APBN) yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Populasi dan sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota dari tahun 2020-2022.

#### **Hasil dan Pembahasan**

##### **Langkah Pemilihan Model**

Terdapat tiga estimasi model dalam data panel yakni *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) dengan patokan hasil uji *chow* dan uji *hausman*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran penting dalam mencerminkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Studi kasus di Provinsi Sumatera Barat mengindikasikan bahwa PAD berfungsi sebagai sumber pendapatan yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali potensi lokal untuk membiayai pembangunan dan operasional. Sementara itu, DAK, yang merupakan transfer dari pemerintah pusat, bertujuan mendukung prioritas tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh PAD.

1) Chow tes

Uji *chow* digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik digunakan, yakni antara *common effect* dan *fixed effect*. Jika pada *Cross-sention Chi-square* lebih kecil dari alpha ( $0,0000 < 0,05$ ), maka  $H_a$  ditolak artinya model *fixed effect* lebih baik digunakan dari pada model *comman effect*. *Output chow test* disajikan pada Tabel 1.

**Table 1. Output Chow Test**

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.230007	(18,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	139.780967	18	0.0000

Sumber: *pengelolaan Data Eviews 9, 2023*

Hasil dari uji chow pada Tabel 1 dengan menggunakan E-views 9 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas lebih kecil dari level signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $H_a$  untuk model ini diterima dan  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2) Hausman Test

Uji hausman digunakan untuk mengetahui model yang lebih baik digunakan, yakni antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka digunakan *fixed effect model*

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka digunakan *random effect model*

**Tabel 2. Output Uji Hausman Correlated Random Effects**

Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq.	Statistic	Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random.	6.496596.	2.	0.0388

Berdasarkan Tabel 2 dengan menggunakan E-views 9 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0388. Nilai probabilitas lebih kecil dari level signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Oleh karena itu model yang dipilih *fixed effect*.

Berdasarkan hasil kedua estimasi model regresi, yakni antara *Chow Test* (tabel 1) dan *Hausman Test* (tabel 2), maka yang digunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk dapat mngestimasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil estimasi menggunakan FEM dapat dilihat dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Output Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.066896	0.005325	12.56155	0.0000
X1	3.444709	2.451912	14.04907	0.0000
X2	-9.036505	1.459100	-0.619320	0.5383

Sumber: data sekunder yang sudah diolah dengan E-views 9, 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat dirumuskan seperti persamaan 2.

$$Y = 0,066896 + 3,444709X_1 - 9,0365505X_2 \quad (2)$$

Penjelasan dari persamaan regresi linear berganda dibawah ini:

- 1) Hasil persamaan linear berganda pada table diatas diketahui bahwa nilai sebesar 0,066896 atau 0,07 poin, maka dapat disimpulkajn bahwa nilaikosntanta bernilai positif. Variabel Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Khusus dianggap konstanta.

- 2) Koefisien regresi variable Pendapatan Asli Daerah (X1) diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 3,444709, maka dapat disimpulkan setiap kenaikan tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 1% maka akan menaikkan kemandirian keuangan daerah sebesar 3,44 poin  
Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X2) diketahui bahwa nilai koefisien sebesar -9,0365505 atau bernilai negatif hal ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan tingkat Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1% akan menurunkan kemandirian keuangan daerah sebesar 9,03 poin.

#### Uji model regresi dan data panel uji t

Uji t dilakukan untuk membandingkan nilai (alpha) dengan nilai p-value, pada uji t juga dapat diketahui arah masing-masing variabel independent dengan melihat tanda koefisien regresinya. Berikut hasil perhitungan regresi linear berganda, dapat dilihat pada tabel 4.7, menunjukkan hasil seperti yang disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Output Regresi Linear Berganda**

Vrb	Koef	t-Statistik	Prob	Alpha	Kesimpulan
PAD	3,4447	14,0491	0,0000	0,05	H1 Diterima
DAK	-9,0365	-0,6193	0,5383	0,05	H2 Ditolak

Sumber: *Pengelolaan Data Eviews 9,2023*

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

#### Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan

untuk mengukur sejauh mana kemampuan model redresi dalam memprediksi variabel dependen, koefisien determinasi memiliki besaran nilai antara nol sampai dengan satu. Jika hasil pengujian memperoleh R<sup>2</sup> yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

Ouput Koefisien Determinasi disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Output Koefisien Determinasi**

N	r-squared	adj-squared
57	0,792285	0,784591

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah Dengan E-Views 9, 2023

Berdasarkan pada Tabel 5 hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) diatas menunjukkan nilai adjust r squared (r<sup>2</sup>) sebesar 0,784591. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus daerah sebesar 78,45%. Sedangkan sisanya sebesar 21,55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

##### Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan hasil oleh data statistik dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hipotesis pertama pada penelitian ini dapat diterima dengan kata lain memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Yang artinya bahwa pemerintah daerah telah melakukan Upaya peningkatkan dalam membangun daerah agar dapat digunakan oleh masyarakat

setempat, sehingga nantinya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahardika, 2022) dan (Amalia Fauziah N & Haryanto, 2019) yang menyatakan bahwa setiap kenaikan PAD akan diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan data statistic pada penelitian ini, rata-rata atau nilai mean tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat tahun 2020-2022 yakni sebesar 0,1095 atau 10,95%. Sementara diketahui bahwa tingkat yang memiliki Kemandirian Keuangan Daerah terendah yakni pada kab. Kepulauan Mentawai tahun 2020 diketahui nilai minimum 0,041865 sedangkan yang memiliki tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi yakni pada kota Padang tahun 2021 diketahui nilai maximum sebesar 0,393305. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk meningkatkan lagi pendapatn asli daerah sehingga memberikan dampak pada kemandirian daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang mencerminkan kondisi rill daerah dan menunjukkan kemandirian kueangan daerah. PAD itu sendiri dapat diartikan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Hal ini terjadi karena sebagian besar pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk belanja Pegawai. Dana Alokasi Khusus

digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutup celah fiskal yaitu selisih antara kapasitas fiskal yang tersedia dengan kebutuhan dasar yang salah satunya adalah belanja pegawai.

### **Kesimpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan, hipotesis pertama diterima, yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh positif terhadap terhadap variabel Kemndirian keuangan daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar PAD yang diterima suatu daerah maka akan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya. Hipotesis kedua ditolak, yaitu variabel Dana Alokasi Khusus terbukti tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya besar atau kecilnya dana alokasi khusus yang diterima oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amalia Fauziah N, A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro*

- Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Febrianty, N., Putra, G. H., Ilmu, T., & Kbp, E. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada 19 Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021*.
- Indrianingrum, H., & Priyono, Nuwun, 2023. (2023). *TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG PADA TAHUN 2006 – 2021*. 2.
- Kustianingsih, N., Muslimin, & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Mahardika, E. P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407–416.
- Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.
- Nasution, A. P., Handoko, B., & Pohan, I. R. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 192–206.
- Puspitasari, A., & Salisa, N. R. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Keresidenan Pati Tahun 2010-2016). *Accounting Global Journal*, 1(1), 30–41.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 298–314. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v3i1.2143>
- Sarumaha, M. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D.*

---

**Copyright holder:**

Gerry Hamdani Putra, Muhammad Rivandi (2024)

**First publication right:**

JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)

**This article is licensed under:**

